

TAJUK RENCANA

Provokator Tiada Henti

TEGANYA dr Lois Owen, di tengah tingginya angka orang yang terpapar Covid-19, puluhan ribu orang yang meninggal di antaranya adalah tenaga medis, malah berkoar-koar membuat kabar bohong. Bahwa yang meninggal tersebut bukan karena Covid-19, namun karena pemberian obat 6 macam. Ada 3 platform media sosial yang sengaja dia sebar di tengah masyarakat yang sedang dilanda ketakutan (KR 13/7).

Syukurlah, kini dokter yang disebut koleganya kemungkinan karena hanggauan jiwa yang menyebut para nakes yang meninggal karena Covid-19, sebagai mati konyol, sudah di bekuk polisi. Kita tunggu saja, ada apa di balik provokasi dokter yang ternyata tak terdaftar sebagai anggota IDI itu.

Tertangkapnya dokter yang provokator tersebut, makin melengkapi daftar panjang, bahwa masih saja ada orang yang bikin onar melalui media sosial. Sebab salah satu permasalahan, yang membuat pandemi ini makin menjadi-jadi dan makin membuat panik masyarakat adalah banyaknya berita bohong atau hoaks.

Gelombang ribuan informasi yang bisa diakses setiap saat, memang menguntungkan karena orang bisa tahu cepat mengenai informasi yang terjadi. Bahkan hari-hari terakhir orang cepat tahu ada pejabat tertentu sudah terpapar Covid-19, atau tiba-tiba saja saudara, sahabat atau kawan lama sudah dikabarkan wafat karena virus itu. Kabar begitu cepat, merasa dalam ranah kita secara pribadi melalui gadget. Namun ada sisi lainnya maraknya pula berita palsu. Informasi tidak benar yang merekahkan, membuat pandemi makin berkepanjangan dan meresahkan.

Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) mencatat, mulai 21 Januari 2020 hingga 26 Juni 2021 saja sudah ada 1.026 hoaks. Kabar bohong itu me-

nyebar melalui media sosial. Mulai dari kategori berita salah, konten yang menyesatkan, atau konten dengan data-data palsu dan foto yang dibuat salah-olah benar.

Jahatnya pelaku hoaks dan tak berdayanya publik tanah air, tampak dalam survei Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index/DCI) Microsoft yang dirilis bulan Februari 2021, Indonesia terpuruk pada 29 dari 32 negara yang disurvei lantaran kasus hoaks, penipuan daring, kejahatan siber, ujaran kebencian dan diskriminasi.

Semasa Pilpres hoaks muncul pada tipikal politik atau ujaran kebencian mendominasi karena polarisasi yang terjadi kala itu. Kini muncul dan semarak kombinasi antara tipikal politik, orang yang cenderung percaya konspirasi dan yang patuh pada protokol kesehatan.

Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang bisa dilakukan seperti Cekdata, atau komunitas anti hoaks. Tetapi masalahnya karena banyak masyarakat yang malas untuk cek data. Semua informasi yang dikonsumsi masyarakat cenderung malas membaca dan verifikasi lebih lanjut. Masyarakat seperti gelap mata, tak ingin ketinggalan dengan yang lain, tidak ada kesibukan positif selama 'work from home', maraknya grup dalam media sosial berlomba cepat kirim tanpa dipahami, apakah yang dikirim itu informasi benar atau menipu.

Ditangkapnya dr Louis, bukan berarti berita palsu, provokasi akan berhenti. Karena masih berseliweran di tengah mirisnya situasi di negeri ini.

Masyarakat diharapkan tetap teliti sebelum mengirim, memahami apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jangan biarkan masyarakat semakin bingung, di tengah situasi seperti saat ini. Semnua menjadi kondusif bila masyarakat ikut berpartisipasi mengatasinya. (***)

Babak Baru Pengelolaan Sampah

BEBERAPA waktu yang lalu sejumlah warga sekitar lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Piyungan melakukan protes terkait rencana perluasan area TPA Piyungan. Mereka memasangkan sejumlah spanduk di area masuk TPA. Penulis lebih memilih istilah TPA daripada TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) karena faktanya belum ada pengolahan sampah di area TPA Piyungan. Ini adalah penolakan ke sekian kalinya dengan berbagai alasan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa TPA Piyungan melayani pembuangan sampah dari tiga kabupaten/kota yaitu Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Kartamantul). Akibatnya bisa ditebak, terjadi penumpukan sampah di ketiga wilayah tersebut saat terjadi penutupan TPA. Selama pengelolaan sampah di TPA Piyungan masih seperti saat ini, kemungkinan terulangnya kejadian tersebut sangat besar dan berdampak pada pengelolaan persampahan di Jogja dan sekitarnya.

Sepertinya pemerintah daerah menemui jalan buntu untuk mengatasi permasalahan sampah, tanpa ada alternatif solusi yang komprehensif dan cepat. Karenanya, perlu segera ada kebijakan baru yang sangat urgen untuk diterapkan terkait pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan untuk menciptakan kota Yogya yang nyaman.

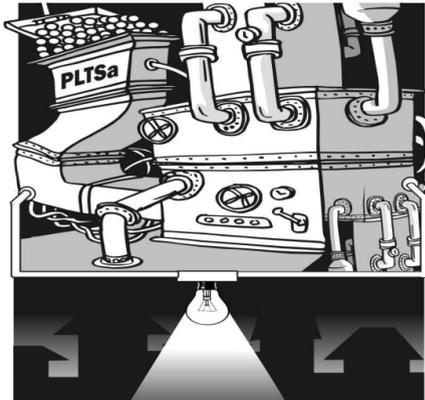
Instalasi PSEL

Kabar baiknya, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu meresmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Benowo yang ada di kota Surabaya. Instalasi pengolahan sampah yang istilah lainnya adalah pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) ini adalah yang pertama beroperasi di Indonesia secara komersial. Kapasitasnya listrik 9 MW dan dapat mengolah sekitar 1.000 ton sampah per harinya. PLTSA ini menggunakan sis-

Mochamad Syamsiro

tem teknologi termal gasifikasi yang bisa mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan.

Ada beberapa skema teknologi termal untuk mengubah sampah kota menjadi listrik. Salah satu teknologi yang sangat populer adalah pembakaran atau insinerasi yang biasa digunakan pada PLTSA, dimana sampah dibakar untuk menghasilkan energi



KR-JOKO SANTOSO

panas sebagai penggerak turbin untuk memutar generator penghasil listrik. Pada prinsipnya ada 4 tahapan proses insinerasi yaitu proses *pre-treatment*, proses pembakaran, proses *energy recovery* dan penanganan gas buang.

Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dari sistem PLTSA ini yaitu musnahnya sampah dan energi listrik yang dihasilkan. Sistem ini bisa dikombinasikan dengan gasifikasi pada sistem pembakarannya. Sistem gasifikasi juga bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan *syngas* yang dihubungkan ke *gas engine* sebagai penghasil listriknya. Model penyiapan bahan bakar untuk pembangkit listrik menjadi RDF (*refused derived fuel*) seperti di Cilacap juga bisa diterapkan sebelum masuk ke

sistem pembangkitan listrik.

Bagaimana Yogya?

Menurut Presiden Jokowi saat meresmikan PLTSA Benowo Surabaya, kota lain tinggal melihat dan meniru yang sudah dibuat di Surabaya. Sehingga menjadi lebih mudah karena ada contoh rill di lapangan yang sudah jadi. Dengan sistem yang sama seperti apa yang diterapkan di Surabaya, Yogya bisa mengadopsi dan menerapkannya di TPA Piyungan dengan berbagai pilihan teknologi termal seperti insinerasi, gasifikasi maupun produksi RDF. Dengan kapasitas sampah sekitar 600 ton per hari, bukan sesuatu yang sulit karena lebih kecil dibanding dengan Surabaya.

Masyarakat Yogya sudah menunggu sejak lama untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan ramah lingkungan dengan penerapan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik. Sudah saatnya pemerintah daerah segera memutuskan pilihan teknologi terbaiknya dan langsung membangunnya. Tak perlu banyak berdiskusi dan berdebat yang akan menghabiskan energi dan waktu. Sebelum 'bom waktu' sampah akan terjadi di Jogja.

Dr Eng Mochamad Syamsiro, peneliti sampah menjadi energi, Direktur Center for Waste Management & Bioenergy dan Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Janabadra Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Korupsi, Ironi Negara Birokrat

SULIT dibantah, korupsi menjadi petunjuk nyata kalau ada yang tidak beres dalam tubuh birokrasi di negara. Dan petunjuk itu selalu luput dan gagal untuk dibaca dalam kajian perspektif historis. Padahal jika ditangani lebih serius, dapat diketahui bahwa unsur-unsur penyebab ketidakberesan tersebut sesungguhnya adalah ironi dari leluhur negara kolonial Hindia Belanda yang dinamakan negara birokrat (*Beamtenstaat*).

Dalam buku *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* (2000), Benedict ROG Anderson mengungkap, negara kolonial yang pada awalnya dibangun melalui VOC, sesudah dibubarkan awal abad ke-19, mulai mengubah diri menjadi negara birokrat yang terpusat dan ramping. Artinya, negara kolonial yang dinamai Hindia Belanda itu tetap menjalankan operasi-operasi monopolistik dan melakukan eksploitasi alam serta manusia sebagai modal untuk menghimpun kekuatan finansialnya.

Tentara KNIL

Sejak tahun 1910, Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) ditugasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Nusantara. Itulah mengapa negara kolonial membutuhkan perluasan dalam hal ketersediaan aparat negara yang bukan sekadar mengurus pendidikan, keagamaan, pertanian, kesehatan, atau pertambangan, tetapi juga pengawasan politiknya. Di bawah payung Politik Etis pada tahun 1901, negara kolonial 'mengimpor' para pegawai dari Eropa yang berakibat membengkaknya pengeluaran negara sebesar 'tak kurang dari 50%'.

Menariknya, di tahun 1928 hampir seperempat juta pegawai pribumi tercatat dalam daftar gaji negara. Itu artinya, 90% dari pegawai sipil terdiri dari orang-orang Indonesia. Dan para

A Windarto

pegawai pribumi mulai difungsikan secara maksimal dan dipusatkan dalam negara birokrat kolonial. Di tangan merekalah, urusan administrasi kewilayahan, terutama di Jawa, diserahkan.

Tetapi ketika penguasa militer Jepang berkuasa, terjadi perubahan yang cukup drastis dan menimbulkan kecau-balauan yang tak terkendali. Para pegawai Belanda yang berpengalaman diganti secara mendadak oleh orang-orang Jepang dengan dibantu oleh para pegawai pribumi. Pencetakan uang dilakukan secara berlebihan yang mengakibatkan hiper-inflasi dan gaji para pegawai menjadi tidak ada artinya lagi. Di sinilah korupsi mulai berkembang dan merambah dengan cepat, sehingga merendahkan moral pegawai secara mendalam.

Menjalin Relasi

Memasuki era Revolusi, praktis ada dua negara yang bercokol di Nusantara, yaitu negara republik yang baru dilahirkan dan negara Hindia Belanda yang berupaya untuk kembali. Pada akhir tahun 1949 berkat pengakuan resmi dari dunia internasional dua negara yang semula saling bermusuhan dilebur dalam satu kenegaraan yang bercorak serikat. Inilah bentuk negara yang tidak ada pilihan rezim lain yang mungkin. Akibatnya, negara yang masih lemah secara militer, ekonomi dan birokrasi menjadi tertatih-tatih dalam setiap langkahnya, termasuk untuk menanggung beban 1.130 juta dollar utang dari negara Hindia Belanda.

Di bawah kendali Suharto,

negara baru yang diorkestrasi para teknokrat tampil untuk meningkatkan standar hidup rakyat, memperbaiki kesejahteraan sosial dan memodernisasi struktur ekonomi. Mirip dengan kecenderungan 'Etis' dari pejabat-pejabat *beamtenstaat* kolonial, para perencana pembangunan itu dengan segera menjalin relasi dengan para donatur asing dan pengusaha papan atas yang tidak berkepentingan apalagi berambisi secara politik. 'Orang-orang Cina' adalah salah satu kelas sosial yang baik secara ekonomi maupun politik dimanfaatkan Orde Baru untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat. Melalui pembatasan partai politik dan pembentukan partai negara Golkar, Orde Baru semakin tampak tak tertandingi terutama berkat kebijakan keamanan yang diwarisi dari negara kolonial dan juga penguasa militer Jepang.

A. Windarto

Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta

Pojok KR

Dugaan sebagai pembuat hoaks, dr Lois ditangkap polisi.

-- Bukan berarti hoaks habis!.

Vaksin berbayar dibatalkan.
-- Ketimbang malah menambah materi hoaks.

Mobilitas berkurang, angka Covid-19 masih tinggi.

-- Dampak aktivitas sebelumnya yang langgar prokes.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat

Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Seni Menabung Kakeibo

BANYAK dari sebagian besar kita sering curhat dalam masalah finansial. Dalam tulisan ini saya hendak berbagi cerita tentang sebuah buku berjudul Kakeibo, karya Fumiko Chiba. Pemaparan dalam buku ini sangat cocok untuk siapa saja yang mengalami masalah money management, utamanya kesulitan untuk menabung. Kakeibo bisa juga kita sebut sebagai seni orang Jepang dalam menabung. Kakeibo pertama kali diperkenalkan 1904 oleh Hani Motoko, jurnalis wanita pertama di Jepang.

Ada tiga hal penting dari buku ini yang bisa kita rangkum. Pertama, catat jurnal keuangan setiap bulan. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulan, diharapkan kita bisa memahami bagaimana interaksi kita dengan uang secara faktual. Pencatatan sebaiknya dilakukan secara manual, ditulis di atas kertas, hindari penggunaan software atau aplikasi keuangan. Dengan pencatatan manual ini dimaksudkan agar sewaktu kita menuliskannya kita akan lebih sadar finansial di saat tersebut. Kita jadi bisa memahami hal apa saja yang menyebabkan kebiasaan buruk kita soal uang.

Kedua, bagi budget menjadi empat kategori. Metode Kakeibo menawarkan pada kita empat kategori penempatan pengeluaran pendapatan, yaitu survival, opsional, culture dan extra. Survival merupakan kategori pengeluaran pokok seperti biaya makan, belanja bulanan, transportasi, dan biaya sewa. Opsional adalah kategori pen-

geluaran yang tidak mendesak seperti makan di luar, dan belanja non kebutuhan pokok. Culture adalah kategori pengeluaran untuk menambah pengalaman seperti buku, bioskop dan sebagainya. Extra adalah kategori pengeluaran yang tak terduga seperti misalnya kendaraan rusak, genteng bocor, hadiah pernikahan dan sebagainya. Adapun tujuan dari latihan ini ialah untuk membuat kita menjadi semakin sadar terhadap pengeluaran setiap bulannya

Tips lain dari Kakeibo ialah senantiasa belanja dengan uang tunai. Lebih konkret lagi dengan menggunakan pola amplop fisik untuk memantau pengeluaran belanja kita. Bila dirasa kurang praktis bisa dipraktikkan dengan menggunakan minimal dua akun bank yang berbeda untuk anggaran pendapatan, pengeluaran dan belanja kita.

Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kultur orang Jepang terbiasa hidup minimalis. Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis daerah Jepang yang rawan gempa bumi dan tsunami, sehingga membuat masyarakat Jepang cenderung menyimpan dan memiliki barang atau properti seperlunya saja.

Tujuan dari latihan berdasarkan metode Kakeibo ini bukan berarti kita tidak boleh membeli, tapi kita dilatih untuk membelanjakan uang kita dengan bijak. □

Muhammad Ali Akbar STH
Guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogya.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurida Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lempasari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%